



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Bangka Pos
- Rakyat Pos
- Radar Bangka
- Babel News
- Babel Pos
- Lainnya : _____

Tanggal:

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

2
0
1
9

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

RADAR BANGKA | RABU, 22 MEI 2019
HALAMAN 12

Pemkab Bangka Kembali Meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian

Dalam Pengelolaan APBD 2018 Hattrick Dalam Penghargaan yang Sama






PEMKAB Bangka kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Widhi Widarati kepada Bupati Bangka, Mulkan, SH., MH., di Ruang Pertemuan BPK di Pangkalpinang Selasa (21/5/2019). Predikat WTP ini merupakan hattrick setelah Pemkab Bangka juga mendapatkannya di tahun 2017 dan 2018.

Atas capaian ini, Bupati Bangka, Mulkan mengungkapkan rasa syukur, perasaan lega dan bangga akan keberhasilan Pemkab Bangka diawal jejak kepemimpinan.

"Ini rasanya seperti betul-betul berkah Ramadhan, kerja keras berapi-berapi akhirnya menghasilkan prestasi yang membanggakan," ungkap Bupati Bangka.

Lebih lanjut Bupati Bangka menjelaskan, Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan persyaratan profesional pemeriksa mengenai kewajaran pengelolaan keuangan Pemkab Bangka Tahun 2018 yang diumumkan dalam Laporan

menjadi pendorong untuk terus membangun budaya pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel dan tentu saja harus berorientasi pada hasil. Wabup juga menyatakan bahwa kejujuran dan keikhlasan harus menjadi prinsip utama bagi siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Dengan kejujuran dan keikhlasan, pengelolaan keuangan akan berada pada jalurnya (on the track), terhindar dari penyimpangan dan manipulasi sehingga insansinya pun tetap sehat dan terjaga dari kebangkrutan," jelas Wakil Bupati.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian Napitipulu menyatakan kebanggaannya dengan apa yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun ini melanjutkan tradisi beberapa tahun sebelumnya dalam penilaian Dia pun berharap keberhasilan pemerintahan agar tetap bisa diaga hingga kelak di kemudian hari.

"Kita yang menerima ITP dan BPK dan mendapat predikat ini merasa lega karena sekali lagi Bangka mendapatkan prestasi sebagai daerah masa kepemimpinan bupati yang baru beberapa bulan," Ungkap ketua DPRD.

Dramabahkan, PJ Sekda Bangka, Ahmad Nugsin, opini WTP yang diraih harus menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja, perbaikan sistem

unggul, ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Inspektoral, Darius menyatakan bahwa Pemkab Bangka mengelola APBD sepenuhnya berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Aturan tersebut mengacu basis Cash towards Accrual, dimana Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dengan basis akrual, sedang Penerapan SAP sampai memperoleh opini WTP merupakan rangkaian proses panjang dan dilakikan berdasarkan pada kesesuaian dengan SAP, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

"Pasal-pasal dalam SAP yang digunakan sebagai kriteria kami paham sebagai satu kesatuan yang utuh dengan mempertimbangkan karakteristik karakteristik laporan keuangan yang merupakan prasyarat norma yang relevan, andai dapat dibandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Darius.

Pada kesempatan yang sama pula, Kepala Bapppda, Fari Budhi Mersoso, menyatakan bahwa Opini WTP yang diperoleh bukan hasil instan, tetapi melalui proses terstruktur dengan mengedepankan pembelajaran tinggi dan sistem yang profesional. Kami

diskusi pengelolaan APBD dengan Laporan Kinerja. Dengan cara ini kami juga meyakini bahwa pelaksanaan APBD atau suatu program atau kegiatan di OPD Pemkab Bangka sudah relatif ekonomis, efisien, dan efektif.

"Balwa opini WTP dari BPK merupakan bukti kinerja Pemkab Bangka yang terintegrasi. Integrasi tersebut dapat dilihat dari mekanisme kerja seluruh OPD yang terstruktur dengan baik dan terus diawasi sekaligus dievaluasi secara ketat oleh pimpinan, mekanisme kerja tersebut meliputi perencanaan program kerja, penganggaran pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, kesangan dan lain-lain. Jadi, kuncinya adalah membangun integrasi," Ungkapnya.

"Dengan integrasi antara tata kelola keuangan daerah dan kinerja inilah Pemkab Bangka banyak mendapatkan prestasi dan penghargaan bergengsi. Disamping meraih Top 10 Pembangunan Daerah se Indonesia dari Bapppda, Pemkab Bangka juga meraih predikat Sangat Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keterbacaan Pelayanan Publik Zona Digo dengan skor tertinggi di Indonesia, Sinarik Award dari Kementerian PAN-RB, Kalpataru dan Kementerian Kesehatan dan Lingkungan Hidup serta berbagai penghargaan lainnya," Pungkaskan Darius.